

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Bersama ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian Saya yang berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta”**. Kontribusi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat, bagi penelitian, Pemerintah, maupun pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiannya.

Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamuallaikum wr.wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,

Penulis

Herlina Rahmawati Dewi, S.E., M.Sc.

Karismawati Agustin

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur :

Badan/Dinas :

Jabatan :

Lama menjabat :

Pendidikan terakhir : SMA S2
 Diploma S3
 S1 lainnya

Cara Pengisian Kuesioner :

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda *check list* (√) pada pilihan jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dengan memilih:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. S : Setuju
4. SS : Sangat Setuju

A. Kejelasan Sasaran Anggaran

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefiniskan dengan jelas dan komprehensif.				
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif.				
6.	Pada instansi tempat Saya bekerja, antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif				

7.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan anggaran secara efektif ditentukan oleh usaha yang dikerahkan, kemampuan kualitas seseorang, partisipasi, penetapan sasaran, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya				
8.	Pada instansi tempat Saya bekerja, anggaran merupakan harapan bagi instansi di awal tahun anggaran. Sedangkan pada akhir tahun anggaran, anggaran merupakan standar untuk mengevaluasi kinerja instansi				

B. Pengendalian Akuntansi

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, Audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, evaluasi yang sistematis dan terjadwal tidak digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, penetapan target anggaran digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.				

4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, rencana jangka pendek dan jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.				
6.	Setiap transaksi yang terjadi pada instansi tempat Saya bekerja telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.				
7.	Pada instansi tempat Saya bekerja, setiap transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.				
8.	Pada instansi tempat Saya bekerja, catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.				
9.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan				

C. Sistem Pelaporan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.				

2.	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat Saya bekerja, telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji				
5.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat Saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				

D. Ketaatan Peraturan Perundangan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, instansi tempat Saya bekerja telah mentaati peraturan perundangan yang berlaku.				
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, bagi pejabat penerima amanah yang tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi (hukuman).				

3.	<p>Pada instansi tempat Saya bekerja telah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi instansi.</p>				
4.	<p>Dalam melakukan pengelolaan keuangan, instansi tempat Saya bekerja telah menggunakan prosedur yang ada dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.</p>				
5.	<p>Dalam pembuatan laporan keuangan, instansi tempat Saya bekerja telah menggunakan prosedur PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Berikut beberapa aturan yang ada dalam PP No. 8 Tahun 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap instansi wajib membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. b. Laporan keuangan setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan CALK. c. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing- masing program. 				

6.	Dalam pembuatan laporan keuangan Saya menggunakan prosedur PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.				
7.	Dalam melakukan pengelolaan keuangan, instansi tempat Saya bekerja telah mengikuti prosedur yang ada dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.				

E. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
1.	Pada instansi tempat Saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.				
2.	Visi dan misi program instansi tempat Saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.				
3.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.				
4.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan				

	untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.				
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.				
6.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan.				
7.	Pada instansi tempat Saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program				
8.	Kegiatan / program yang disusun oleh instansi tempat Saya bekerja telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.				
9.	Pada instansi tempat Saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.				
10.	Pada instansi tempat Saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.				